

Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Bprs (Studi Kasus: Pt Bprs Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar)

Maghfira Insani¹, Miswardi², Baginda Parsaulian³, Tartila Devy⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: maghfirainsani0404@gmail.com¹, miswardi@uinbukittinggi.ac.id²,
bagindaparsaulian@yahoo.com³, tartilaa@gmail.com⁴

Abstrak

Implementasi *Islamic Corporate Governance (ICG)* pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan syariah diterapkan dalam operasional bank, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Yang diimplementasikan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja serta kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui pendekatan reduksi data dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Pertanyaan wawancara mencakup mekanisme publikasi laporan keuangan, komunikasi kebijakan dan kinerja keuangan kepada publik, pelaporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham, kebijakan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola keuangan syariah, program berkelanjutan untuk nasabah dan komunitas, pengelolaan risiko, inisiatif literasi keuangan syariah, serta prinsip kesetaraan dalam pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik ICG di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, serta mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola syariah. Studi ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implementasi ICG dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Islamic Corporate Governance, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Abstract

Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. The main objective of this study is to understand how the principles of Islamic corporate governance are applied in bank operations, including aspects of transparency, accountability, responsibility, and fairness. Which are implemented at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek and how they affect performance and customer trust. This study uses a qualitative type through a data reduction approach with a case study method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Interview questions covered the mechanism for publishing financial reports, communicating policies and financial performance to the public, reporting accountability to shareholders, sanction policies for violations of Islamic financial governance, sustainable programs for customers and communities, risk management, Islamic financial literacy initiatives, and the principle of equality in service. The results of this study are expected to provide a comprehensive picture of ICG practices at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, as well as identifying strengths and areas that need improvement in the implementation of Islamic

governance principles. This study is expected to contribute to a better understanding of the implementation of ICG in Islamic financial institutions in Indonesia.

Keywords: *Islamic Corporate Governance, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.*

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Orang Syariah (BPRS) di Sumatera Barat memainkan kedudukan berarti dalam mensupport perekonomian warga lewat pembiayaan yang cocok atas prinsip syariah. Tetapi, atas perkembangan pabrik perbankan syariah yang cepat, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami kompetisi yang terus menjadi kencang. Banyak BPRS terkini yang bermunculan, menawarkan produk serta layanan yang menarik atensi pelanggan. Atas tahun 2023 BPRS Haji Miskin Pandai Sikek atas jumlah pelanggan yang melaksanakan pembiayaan sebesar 3. 217 orang, BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek mempunyai karyawan sebesar 43 orang telah termasuk dewan. Dalam kondisi ini, berarti buat BPRS Haji Miskin Pandai Sikek memiliki metode buat menghadapi kompetisi antara BPRS yang terdapat di Sumatera Barat atas produk favorit mereka salah satunya yakni produk pembiayaan sepeda motor ataupun akad murabahah, dimana BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempraktikkan prinsip- prinsip Islamic

Corporate Governance bisa bersaing serta mendapatkan keyakinan atas pelanggan. Kompetisi yang kencang ini membutuhkan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek buat tidak cuma fokus atas kenaikan produk serta layanan, namun pula mempraktikkan prinsip- prinsip aturan mengurus industri islam atas cara bagus.

Islamic Corporate Governance (ICG) yakni rancangan yang diturunkan atas GCG. Buatan yang buatnya tidak serupa yakni bawah aturannya ialah atas islamic corporate governance memakai hukum islam. ICG umumnya diproksikan atas Sharia Supervisory Board (SSB) ataupun diucap selaku Badan Pengawas Syariah (DPS) ialah buatan berarti yang membuat bank syariah tidak serupa atas bank konvensional. DPS ialah susunan bonus atas metode kontrol serta pengawasan yang bebas buat menghinatas manajemen industri atas aktivitas pemodalan yang mempunyai resiko besar atau atas aktivitas pemodalan yang kurang berisiko.¹

Aplikasi yang bagus atas aturan mengurus industri bisa tingkatkan

¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2006).

kejernihan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, yang atas pendampingnya bisa tingkatan energi saing BPRS di pasar yang terus menjadi bersaing. Aplikasi Good Corporate Governance bermaksud buat tingkatan kemampuan ataupun aturan mengurus industri, yang berarti industri hendak dimudahkan dalam menggapai tujuan kuncinya. Abila kemampuan industri terus menjadi pulih, angka industri hendak senantiasa bagus. Alhasil penerapan Islamic Corporate Governance mempunyai efek keatas kemampuan perbankan syariah di Indonesia.

Perihal ini berarti buat menganalisa gimana BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempraktikkan prinsip-prinsip aturan mengurus industri islam serta menantang apa saja yang dialami dalam usaha bersaing atas BPRS yang lain. Keterbatasan jaringan operasional jadi tantangan buat BPRS dalam mengalami kompetisi yang terus menjadi lingkungan. Banyak BPRS cuma bekerja di area khusus atas jumlah kantor agen yang terbatas. Berlainan atas Bis yang mempunyai jaringan yang lebih besar, bagus dalam rasio nasional ataupun global, BPRS kerap kali hadapi kesusahan dalam menjangkau pasar yang lebih besar serta menarik lebih banyak pelanggan. Keterbatasan ini pula berefek atas rendahnya akses warga keatas layanan perbankan syariah yang lebih inklusif.

Tingkatan literasi finansial syariah yang sedang kecil di warga pula jadi tantangan buat BPRS dalam mengalami kompetisi.

Banyak warga yang belum menguasai atas cara mendalam rancangan perbankan syariah serta khasiatnya dibanding atas perbankan konvensional. Perihal ini menyebabkan rendahnya atensi warga buat memakai layanan BPRS. Tidak hanya itu, anggapan kalau produk BPRS lebih terbatas serta kurang fleksibel dibanding atas bank konvensional ataupun Bis pula jadi halangan dalam tingkatan energi saing mereka. Atas melonjaknya kompetisi di zona BPRS, dibutuhkan strategi yang lebih adaptif serta inovatif supaya BPRS bisa bertahan serta bertumbuh. Usaha yang bisa dicoba antara lain yakni tingkatan investasi lewat sinergi atas penanam modal penting, meluaskan jaringan operasional atas sokongan teknologi, dan meningkatkan produk serta layanan finansial yang lebih inovatif serta berplatform digital.

Tidak hanya itu, kenaikan literasi finansial syariah di warga dan optimalisasi pangkal energi orang yang profesional pula jadi tahap berarti dalam mengalami kompetisi yang terus menjadi kencang. Atas strategi yang pas, BPRS bisa menguatkan letaknya dalam pabrik finansial syariah serta lalu membuat partisipasi buat

pembangunan ekonomi berplatform syariah di Indonesia.

Bank Pembiayaan Orang Syariah (BPRS) ialah salah satu instrumen finansial syariah yang berfungsi berarti dalam mensupport zona ekonomi warga, khususnya di wilayah pedesaan serta zona upaya mikro, kecil, serta menengah (UMKM). Berlainan atas bank biasa syariah, BPRS mempunyai rasio operasional yang lebih terbatas, namun senantiasa diharuskan buat mempraktikkan prinsip- prinsip syariah dalam semua pandangan kegiatannya. Salah satu buatan kunci dalam melindungi disiplin keatas prinsip syariah serta keberlanjutan operasional BPRS yakni aplikasi Islamic Corporate Governance (ICG).

Islamic Corporate Governance ialah sistem aturan mengurus industri yang menggabungkan prinsip- prinsip syariah dalam manajemen, pengawasan, dan pengumpulan ketetapan. Rancangan ini menekankan atas penanda kesamarataan, kejernihan, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam mengatur badan finansial syariah. Aplikasi ICG yang bagus tidak cuma membenarkan disiplin keatas hukum Islam, namun pula tingkatan keyakinan warga keatas sistem perbankan syariah, tingkatan kemampuan operasional, dan kurangi resiko bidang usaha yang bisa mudarat badan finansial serta para pengelola

kebutuhan. Keterbatasan Kedudukan Badan Pengawas Syariah (DPS) DPS mempunyai kedudukan penting dalam membenarkan operasional bank cocok atas prinsip syariah.

Tetapi, di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, DPS dalam memantau aktivitas perbankan sedang belum maksimal. Perihal ini dapat diefakkan oleh keterbatasan jumlah badan, minimnya kedaulatan dalam membuatkan saran, ataupun keterbatasan dalam melaksanakan audit syariah atas cara teratur. Disiplin Syariah yang belum Tidak berubah- ubah Sebuatan pandangan dalam operasional bank sedang mengalami tantangan dalam aplikasi prinsip syariah atas cara penuh. Misalnya, dalam distribusi pembiayaan, sedang ada kemampuan aplikasi yang belum seluruhnya cocok atas akad syariah, bagus dalam pandangan administrasi ataupun dalam aplikasi buat hasil yang seimbang. Minimnya Kejernihan, Akuntabilitas serta Tanggung Jawab dalam Pengurusan Finansial Islami Corporate Governance menekankan berartinya kejernihan dalam informasi finansial dan pengurusan resiko. Tetapi, dalam praktiknya, sistem peliputan di BPRS ini sedang mempunyai sebuatan kekurangan dalam perihal kelangsungan data atas para pengelola kebutuhan, bagus itu pelanggan, penanam modal, ataupun regulator.

Keterbatasan Kapasitas Pangkal Energi Orang (SDM) SDM yang menguasai Islamic Corporate Governance atas cara mendalam sedang terbatas. Pengelola bank, tercantum manajemen serta karyawan, butuh memperoleh penataran pembibitan berkepanjangan hal aplikasi aturan mengurus syariah supaya bisa tingkatkan daya guna operasional bank dalam mempraktikkan prinsip-prinsip ICG. Sedikitnya Eksploitasi Teknologi dalam Pengawasan serta Aplikasi ICG Teknologi bisa jadi perlengkapan yang efisien dalam tingkatkan kemampuan serta kejernihan aturan mengurus. Tetapi, di BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek, eksploitasi teknologi buat mensupport aplikasi Islamic Corporate Governance sedang terbatas, paling utama dalam pandangan peliputan, pengawasan bisnis, dan aplikasi sistem finansial berplatform syariah yang lebih berintegrasi.

Atas terdapatnya bermacam kasus itu, hingga butuh dicoba riset lebih lanjut buat menganalisa sepanjang mana aplikasi Islamic Corporate Governance di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta faktor-faktor yang jadi penghambatnya. Lewat amatan yang mendalam, diharapkan bisa ditemui pemecahan yang pas buat tingkatkan daya guna aturan mengurus syariah di badan finansial ini, alhasil bisa menghasilkan khasiat yang lebih besar buat warga dan

melindungi keyakinan pelanggan keatas sistem perbankan syariah di Indonesia.

Pangkal energi orang (SDM) ialah peninggalan penting dalam tiap badan, tercantum dalam pabrik finansial syariah semacam Bank Pembiayaan Orang Syariah (BPRS). Mutu serta jumlah SDM yang mencukupi jadi aspek kunci dalam mendukung kesuksesan sesuatu badan finansial dalam membuat layanan yang maksimal atas warga. Dalam kondisi perbankan syariah, SDM tidak cuma dituntut buat mempunyai kompetensi dalam aspek perbankan serta manajemen finansial, namun pula wajib mempunyai uraian yang mendalam hal prinsip-prinsip syariah yang jadi bawah operasional badan.

Tetapi, atas faktanya, keterbatasan pangkal energi orang sedang jadi tantangan penting dalam pabrik perbankan syariah, khususnya atas BPRS. Keterbatasan ini bisa melingkupi bermacam pandangan, semacam minimnya jumlah daya kegiatan yang profesional, rendahnya tingkatan uraian SDM keatas regulasi serta prinsip syariah, sampai sedikitnya akses keatas penataran pembibitan serta pengembangan handal. Salah satu riset permasalahan yang memantulkan kasus ini yakni situasi yang terjalin di BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek. Selaku salah satu BPRS yang bekerja dalam area perbankan syariah, BPRS Haji Miskin

mempunyai tanggung jawab buat mempraktikkan prinsip-prinsip syariah atas cara global dalam tiap pandangan kegiatannya. Tetapi, keterbatasan SDM jadi halangan dalam melaksanakan aturan mengurus yang bagus serta membenarkan disiplin keatas prinsip Islamic Corporate Governance (ICG).

Riset ini butuh dicoba buat buat BPRS jadi lebih bagus dalam mengelolah operasionalnya yang cocok atas syariah islam. Bank Perkreditan Orang Syariah (BPRS) mempunyai kedudukan berarti dalam mensupport perekonomian warga, spesialnya di zona upaya mikro, kecil, serta menengah (UMKM). di tengah pesatnya kemajuan pabrik perbankan syariah, BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek mengalami tantangan besar dalam menjaga energi saingnya.

Bersumber atas penjelasan kerangka balik diatas pengarang berupaya buat melaksanakan riset terpaut kasus diatas berdasarkan judul ***“Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Atas BPRS (Studi Kasus BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.***

KAJIAN PUSTAKA

A. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance atas bank syariah ialah sesuatu bentuk serta metode buat menata tiap pengurusan perbankan dalam menempuh kegiatannya buat menciptakan perekonomian yang lebih bagus. Terus menjadi bagus Islamic Corporate Governance sesuatu perbankan, hingga terus menjadi bagus pula perbankan itu.²

Fungsi-fungsi serta pihak-pihak yang terpaut dalam aplikasi ICG atau GCG: 1) Guna oversight (atensi atas cara totalitas) oleh board of directors (badan dewan) 2) Guna enforcement (penguatan) oleh CEO. 3) Guna advisory (penasihat atau pemberian anjuran) oleh badan komisaris. 4) Guna monitoring (kontrol) oleh stakeholder. Corporate governance berfungsi selaku perlengkapan buat memeberi agama atas penanam modal kalau yang mereka hendak retun atas anggaran mereka investasikan.³ Ada pula penanda Islamic Corporate Governance, ialah: 1) Kejernihan, 2) Akuntabilitas 3) Tanggung Jawab 4) Independensi 5) Kesetaraan 6) Shariah Compliance 7) Istiqamah Prinsip Islamic Corporate Governance: 1) Shiddiq 2)

² Indra. Siswanti, “Implementasi Good Corporate Governance Atas Kinerja Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 7:2 (2016).

³ Badawi Hartati Wiwi, *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

Tepercaya 3) Tablig 4) Fathanah 5) Seimbang 6) Shariah Compliance 7) Istiqamah

Ada pula Tujuan Aplikasi Islamic Corporate Governance 1) Tingkatkan kemampuan, daya guna, serta kelangsungan sesuatu badan yang membuat partisipasi atas terciptanya keselamatan pemegang saham, karyawan serta stakeholders yang lain serta ialah pemecahan yang elok dalam mengalami tantangan badan ke depan. 2) Tingkatkan legalitas badan yang diatur atas terbuka, seimbang, serta bisa dipertanggungjawabkan. 3) Membenarkan serta mencegah hak serta peranan para stakeholders. 4) Pendekatan yang terstruktur bersumber atas kaidah- kaidah kerakyatan, pengurusan serta kesertaan badan atas cara legitimate. 5) Meminimalkan biro cost atas mengatur bentrokan kebutuhan yang bisa jadi mencuat antara pihak prinsipal atas agen. 5) Meminimalkan bayaran modal atas membuat tanda positif buat para fasilitator modal. Tingkatkan angka industri yang diperoleh atas bayaran modal yang lebih kecil, tingkatkan kemampuan finansial serta anggapan yang lebih bagus atas para stakeholders atas kemampuan industri atas

masadepan.⁴ Ada pula Khasiat Aplikasi Islamic Corporate Governance 1) Tingkatkan Keyakinan Warga, 2) Tingkatkan Kemampuan Industri, 3) Membenarkan Pengurusan yang Cocok atas Prinsip Islam 4) Penuhi Keinginan Orang.⁵

B. Perbedaan Islamic Corporate Governance dan Good Corporate Governance.

	<i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Good Corporate Governance</i>
Prinsip	Sidik, Amanah, Tabligh, Fatanah, Shariah Compliance, Itiqamah	a. Penerapan kewajiban serta tanggung jawab Badan Komisaris; b. Penerapan kewajiban serta tanggung jawab Dewan; c. Keseluruhan serta penerapan kewajiban Panitia; d. Penindakan hantaman kebutuhan; e. Aplikasi guna disiplin; f. Aplikasi guna audit internal; g. Aplikasi guna audit ekstern; h. Aplikasi manajemen resiko tercantum sistem pengaturan internal; i. Penyediaan anggaran atas pihak terpaut (related party) serta penyediaan anggaran besar (large exposures); j. Transparansi situasi finansial serta non finansial Bank, informasi penerapan GCG, serta peliputan dalam; dan 1. k. Konsep penting Bank.
Dasar Hukum	Al-qur'an dan Hadis, PBI	UU tentang Perbankan, Peraturan BI, Surat Edaran BI, Peraturan Bapepam
Struktur	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas (Badan Pengawas Pasar Modal)
Mekanisme Efek Pengambilan Keputusan	Kontrak kerja sama Stacholders	Internal dan eksternal Stacholders

C. Peraturan Bank Indonesia Terkait Good Corporate Governance Terpaut atas peraturan Islamic

⁴ Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁵ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Kajian Bisnis* 23 No 1 (2015).

Corporate Governance atas Bank Indonesia, atas cara regulasi merujuk keatas peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11 atau 33 atau PBI atau 2009 legal atas 1 atau 1 atau 2010 Mengenai Penerapan Good Corporate Governance Buat Bank Biasa Syariah serta Buatan Upaya Syariah, ialah kalau dalam bagan membuat pabrik perbankan syariah yang segar serta kuat, dibutuhkan penerapan Good Corporate Governance buat bank biasa syariah serta buatan upaya syariah yang efisien serta penerapan Good Corporate Governance wajib penuhi.⁶

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Persoalan tanya jawab melingkupi metode pengumuman informasi finansial, komunikasi kebijaksanaan serta kemampuan finansial atas khalayak, peliputan pertanggungjawaban atas pemegang saham, kebijaksanaan ganjaran keatas pelanggaran aturan mengurus finansial syariah, program berkepanjangan buat pelanggan serta komunitas, pengurusan resiko, inisiatif literasi finansial syariah, dan prinsip kesetaraan dalam jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Persoalan tanya jawab melingkupi metode pengumuman informasi finansial, komunikasi kebijaksanaan serta kemampuan finansial atas khalayak, peliputan pertanggungjawaban atas pemegang saham, kebijaksanaan ganjaran keatas pelanggaran aturan mengurus finansial syariah, program berkepanjangan buat pelanggan serta komunitas, pengurusan resiko, inisiatif literasi finansial syariah, dan prinsip kesetaraan dalam jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Aplikasi prinsip- prinsip ICG atas lembaga- lembaga finansial syariah memanglah amat berarti, sebab ICG pula bisa dijadikan selaku ketentuan serta sistem buat mengatur dalam melaksanakan sesuatu badan finansial dalam melaksanakan sesuatu badan finansial cocok atas ketentuan yang legal di badan itu.

Prinsip kejernihan diresmikan dalam

⁶ Hikmah Endraswati Sophia Laila, “Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Atas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berbasis Pesantren,” *Journal On Islamic Finance* 8:2 (2022).

BPRS Haji Miskin Pandai sikek semacam dalam peliputan finansial yang disusun per triwulan yang hendak diterbitkan di kediaman data kantor web sah kantor ataupun web OJK. Dalam peliputan finansial BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pula mempublikasikan keuntungan tahunan di alat alat cap salah satunya atas Atasng Cepat Alat Digital Alat, dia berkata kalau perihal itu tercantum mempublikasikan hal informasi finansial atas tahun 2024 hadapi profit sebesar Rp 2, 12 Miliar atas tahun lebih dahulu sebesar Rp 1, 97 Miliar. Tidak hanya itu pihak BPRS Haji Miskin Pula hendak mempublikasikan data hal produk yang terdapat di BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek hal pembiayaan yang hendak dicoba pelanggan dipaparkan atas cara rinci atas pelanggan.

Kejernihan ialah prinsip berarti, namun dalam perihal ini tidak seluruh perihal dia berkata tidak seluruh kerahasiaan bank bisa diterbitkan, misalnya Data yang bertabiat sensitif rahasia bank antara pihak ketiga atas pihak bank, atas pihak biasa ataupun pihak lain yang dibuka atas cara biasa. Perihal ini cocok atas determinasi serta hukum serta etika perbankan yang mencegah pribadi keatas informasi pelanggan.

Dalam mempraktikkan prinsip akuntabilitas BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam peliputan finansial atas pemegang saham, DPS, serta OJK atas melaksanakan

kategorisasi serta peliputan informasi finansial serta peliputan Konsep Kegiatan Bidang usaha Bank (RBB) atas OJK, pemegang saham, serta DPS ada pula sistem pengaturan dalam buat membenarkan ketetapan strategi cocok prinsip syariah serta regulasi. Bila terjalin pelanggaran dalam peliputan finansial yang hendak memperoleh ganjaran atas OJK yakni pihak bank itu sendiri semacam, ketidaksesuaian informasi finansial, keterlambatan memberi tahu. Tidak hanya ditilik oleh OJK peliputan finansial pula ditilik oleh akuntan khalayak.

BPRS mempunyai SOP serta isyarat etik yang menata sikap karyawan serta manajemen, salah satunya atas ganjaran buat pegawai yang tidak cocok dalam peliputan finansial hendak memperoleh ganjaran dalam evaluasi kemampuan. DPS bekerja melindungi kehadiran operasional bank keatas prinsip- prinsip syariah. Bila ditemui kekeliruan hingga DPS hendak mengusulkan tahap korektif serta atau ataupun ganjaran atas manajemen. Bila terjalin pelanggaran dalam peliputan finansial umumnya ganjaran diserahkan atas badan finansial.

Prinsip tanggung jawab dalam prinsip ICG pula diaplikasikan dalam operasional BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek. Prinsip tanggung jawab di BPRS program yang mensupport keberlanjutan serta keselamatan ekonomi pelanggan ialah atas mempublikasikan

dorongan anggaran CSR, anggaran amal. Anggaran amal diserahkan atas warga dekat serta pelanggan, yang cocok atas asnaf 8 berkuasa memperoleh amal (miskin, miskin, amil, muallaf, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil). BPRS pula bertanggung jawab dalam pengurusan efek dalam melindungi keberlanjutan bank, membenarkan bahawa semua kegiatan operasional bank berjalan atas bagus, nyaman, teratasi, dan tidak memunculkan kehilangan dikemudian hari. Kebijakan ini bisa dicoba atas pendekatan manajemen resiko yang telah tertata atas cara global serta berkepanjangan. Kebijakan pengurusan resiko didesain buat mengenali, memantau serta mengatur resiko yang terjalin dalam aktivitas operasional bank, bagus resiko angsuran, resiko likuiditas, resiko operasional, serta resiko nama baik.

Tidak hanya itu, dalam mengalami tantangan serta gairah operasional, BPRS pula membuktikan tanggung jawabnya lewat aplikasi manajemen resiko yang tertata. Risiko- risiko semacam resiko angsuran, likuiditas, operasional, sampai nama baik diatur atas pendekatan yang melindungi serta berkepanjangan. Perihal ini bermaksud buat melindungi kemantapan bank, membuat rasa nyaman buat pelanggan, dan membenarkan keberlangsungan bidang usaha yang segar dalam waktu jauh. Dalam

tingkatkan literasi finansial syariah buat pelanggan tercantum kedalam tanggung jawab pihak BPRS sebab atas membuat bimbingan uraian mengenai finansial syariah, serta pula menjalankan kemitraan atas figur agama dekat. Atas terdapatnya literasi itu diharapkan warga serta pelanggan diharapkan dapat menguasai hendak literasi finansial syariah.

Prinsip kesetaraan dalam BPRS, kesetaraan yang diserahkan BPRS atas pegawai dalam wujud pendapatan, tambahan, apresiasi bersumber atas kemampuan yang seimbang, tembus pandang cocok atas keahlian yang dipunyai. Membuat penataran pembibitan serta pengembangan kompetensi semacam membuat penataran pembibitan dalam aspek teknis perbankan dan sanggup menguasai nilai- nilai syariah. Menjalankan ikatan antara karyawan serta arahan berjalan atas cara terbuka, komunikatif, serta silih menghormati. Kesetaraan yang diserahkan atas pelanggan dapat dalam wujud layanan yang serupa atas tiap pelanggan yang tiba, membuat batas yang bersaing, sistem buat hasil yang cocok.

Keselamatan atas pelanggan tidak dapat diukur atas cara langsung tetapi dapat diamati dalam pemberian pembiayaan apakah omset yang diterima jadi bertambah atas upaya pelanggan itu. Dalam perihal rekrutmen BPRS sendiri melaksanakan promosi di

website BPRS, promosi lewat alat sosial ataupun alat cap. Cara rekrutmen pula dicoba cocok atas hukum ketenagakerjaan uu artikel 33 buatan (1)“ Donatur kegiatan yang membutuhkan daya kegiatan bisa merekrut sendiri daya kegiatan yang diperlukan ataupun lewat eksekutif penempatan daya kegiatan.”

Cara rekrutmen dicoba melaksanakan sebuatan jenjang pemilahan administrasi, uji keahlian, uji tanya jawab, sampai pengecekan kedokteran. Dalam prose rekrutmen pula langkah negoisasi mengenai pendapatan, sarana apa saja yang diperoleh semacam BPJS, pemberian bantuan, BPRS tiap tahun pula ditilik depnaker mengenai persyaratan rekrutmen.

Hasil Pembahasan

1. Transparansi

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melaporkan komitmennya keatas prinsip kejernihan atas terdapatnya peliputan finansial tiap triwulan. Peliputan finansial dikabarkan lewat kediaman data kantor, web website sah BPRS, serta web website OJK.

Tidak hanya itu informasi keuntungan tahunan pula di publish di alat cap salah satunya Atasng Cepat Alat Digital, buat membenarkan kelangsungan data ke khalayak.

Atas tahun 2024, BPRS menulis keuntungan bersih sebesar Rp2, 12 Miliyar, bertambah atas tahun Rp1, 97 Miliyar atas tahun lebih dahulu, membuktikan perkembangan yang positif. Walaupun memajukan kejernihan, ayah Hendri Kamal menekankan berartinya melindungi kerahasiaan pelanggan yang tidak diterbitkan atas cara biasa, yang cocok atas determinasi hukum serta etika perbankan. Perihal itu bermaksud buat mencegah pribadi pelanggan serta melindungi keyakinan pelanggan keatas bank, kejernihan pula berfungsi dalam mendesak kesertaan nasabah dalam memantau serta membuat masukan keatas kemampuan bank.

Perihal ini antusias literasi inklusi finansial yang sudah dicoba OJK, dimana kelangsungan data jadi alat buat mencerdaskan pelanggan dalam mengutip ketetapan mengenai finansial perbankan yang lebih bagus serta bijaksana.

Atas kesimpulannya transparasi, mempunyai 2 tujuan strategi. Awal, mendesak pelanggan buat ikut serta serta aktif memantau serta berikan masukan keatas kemampuan Bank. Kedua seluruhnya searah atas antusias literasi serta inklusi finansial yang

digalakkan OJK. Atas sediakan data yang terbuka, hingga BPRS hendak memberdayakan nasabahnya buat mengutip ketetapan keuangan yang lebih pintar serta bijak.

2. Akuntabilitas

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempraktikkan prinsip akuntabilitas. Perihal itu bisa diamati atas cara peliputan finansial BPRS jalani yang dicoba atas cara teratur atas pemegang saham, Badan Pengawas Syariah (DPS), Daulat Pelayanan Finansial (OJK)

serta tercantum dalam kategorisasi serta peliputan Konsep Kegiatan Bidang usaha Bank (RBB). Peliputan itu cuma bertabiat administratif, namun pula dibarengi atas prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang legal.

Bila terjalin kekeliruan serta pelanggaran dalam peliputan finansial semacam keterlambatan peliputan finansial ataupun isi ketidaksesuaian dalam peliputan. Hingga hendak diberi ganjaran oleh OJK atas pihak bank, oleh sebab itu cara audit serta pengawasan tidak cuma dicoba oleh regulator, tetapi pula oleh akuntan khalayak selaku wujud kejernihan serta penguatan

akuntabilitas eksternal.

BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek pula mempunyai Standar Operasional Metode (SOP) serta isyarat etik yang menata sikap karyawan serta manajemen. Wujud aplikasi bila terjalin kekeliruan yakni pemberian ganjaran atas pegawai serta manajemen atas evaluasi kemampuan atas karyawan yang melaksanakan kekeliruan dalam peliputan finansial. Bila terjalin kekeliruan hingga DPS berhak membuat aksi korektif ataupun ganjaran atas manajemen. Sebaliknya ganjaran yang dicoba oleh pegawai yang hendak membuat ganjaran yakni pihak bank ganjaran dapat dalam wujud peringatan. Campuran pengawasan eksternal yang kencang serta metode dalam yang terdefinisi ini membuat adat akuntabilitas yang kuat di semua kadar badan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab ialah sesuatu kesesuaian prinsip yang diaplikasikan oleh industri keatas peraturan yang sudah diresmikan oleh hukum. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah mempraktikkan prinsip tanggung jawab dalam kerangka Islamic Corporate Governance (ICG) atas

pengoperasionalannya. BPRS tidak cuma berpusat atas profit saja, tetapi tetapi pula menciptakan komitmen dalam menciptakan kematian ekonomi serta keselamatan sosial pelanggan serta warga dekat.

Wujud jelas atas prinsip tanggung jawab BPRS Haji Miskin Pandai Sikek lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) serta amal. Yang mana anggaran amal itu disalurkan atas asnaf 8, perihal ini membuktikan kalau BPRS tidak cuma bertanggung jawab atas cara keuangan saja, namun pula bertanggung jawab keatas warga dekat. Tidak hanya itu, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pula membuktikan tanggung jawabnya dalam pandangan pengurusan resiko buat melindungi keberlangsungan upaya. Bank mempunyai kebijaksanaan manajemen resiko yang disusun atas cara global serta berkepanjangan, melingkupi resiko angsuran, resiko likuiditas, resiko operasional, serta resiko nama baik. Aksi ini memantulkan tanggung jawab manajemen dalam melindungi kemantapan serta kesehatan bank dalam waktu jauh. Lebih lanjut, BPRS pula membuktikan tanggung jawabnya dalam pandangan bimbingan serta pemberdayaan pelanggan, khususnya

dalam tingkatan literasi finansial syariah. Pihak BPRS aktif membuatkan uraian hal rancangan serta aplikasi finansial syariah atas pelanggan. Atas cara totalitas, aplikasi prinsip tanggung jawab di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek membuktikan kalau badan ini tidak cuma memajukan profitabilitas, namun pula menjunjung besar nilai-nilai keberlanjutan, etika, serta perhatian keatas area sosial serta ekonomi sekelilingnya. Aplikasi ini jadi ilustrasi aktual gimana prinsip ICG bisa diimplementasikan atas cara jelas dalam bumi perbankan syariah.

4. Kesetaraan

Kesetaraan ialah faktor kesamarataan ialah dimana dalam pengumpulan ketetapan serta kebijaksanaan yang didapat buat kebutuhan bersama bagus pihak dalam ataupun eksternal tanpa terdapat yang merasa dibebani. Bersumber atas hasil tanya jawab BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek, sudah mempraktikkan kesetaraan dalam pengoperasionalan BPRS. Kesetaraan buat pegawai terlihat dalam pemberian pendapatan, tambahan, apresiasi yang

seimbang serta tembus pandang, perihal itu seluruh diperoleh atas hasil

kemampuan yang bagus serta didasarkan atas penilaian kemampuan yang adil cocok atas keahlian tiap- tiap orang. Menjalakan ikatan yang bagus antara atasan serta pegawai hendak menghasilkan ikatan yang segar serta produktif, perihal itu didasarkan atas komunikasi yang bagus serta tindakan silih menghormati. Kesetaraan keatas pelanggan bisa diamati dalam pemberian layanan yang merapata tanpa melainkan status sosial ataupun juga perbandingan ekonomi. Atas pandangan kesetaraan pelanggan, BPRS tidak bisa mengukur atas cara langsung, tetapi efek pemberian pembiayaan atas pelanggan yang mempunyai upaya bila hadapi kenaikan omzet atas usahanya sehabis mendapatkan pembiayaan atas BPRS. Perihal ini, kesetaraan ditaksir lewat kesuksesan nasabah dalam membangun usahanya selaku sesuatu efek yang positif atas distribusi jasa serta pembiayaan yang disalurkan.

Dalam perihal rekrutmen daya kegiatan, BPRS melaksanakan cara perekrutan atas cara terbuka serta cocok atas determinasi hukum yang legal serta cocok atas uu ketenagakerjaan artikel 33 buatan (1). BPRS melaksanakan rekrutmen cocok atas jenjang atas

biasanya mulai atas jenjang administrasi, uji keahlian, uji tanya jawab, sampai pengecekan kesehatan, atas cara teratur BPRS pula menempuh pengecekan oleh Biro Ketenagakerjaan (DEPNAKER) terpaut disiplin dalam cara rekrutmen. Atas begitu, prinsip kesetaraan yang diaplikasikan oleh BPRS tidak cuma jadi ikon, namun betul- betul diimplementasikan dalam tiap pengoperasionalannya, mulai atas manajemen dalam sampai jasa atas nasabah.

5. *Independensi*

Pada BPRS Haji Miskin Pndai Sikek *Independensi* dalam praktiknya masih terdapat kelemahan. Meskipun secara formal lembaga telah diterapkan, namun pada praktiknya masih terdapat pengaruh kepentingan manajemen yang mempengaruhi keputusan DPS dan manajemen masih perlu diperkuat agar terhidar dari konflik yang dapat melemahkan objektivitas pengawan. Oleh karena itu, *independensi* pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi internal, maupun peningkatan integritas sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Tanpa ada upaya penguatan tersebut, *independensi* DPS

dan manajemen akan sulit diwujudkan secara konsisten.

6. Shairiah Compliance

Shariah compliance di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, bahwa dari hasil wawancara menunjukkan masih ada keterbatasan sosialisasi kepada nasabah mengaidetailnya akad yang digunakan karena kebanyakan karyawan yang ada di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kebanyakan berlatar Belakang pendidikan umum. Hal itu menyebabkan bahwa masyarakat masih ada yang kurang memahami produk akad yang ada. Oleh karena itu, meskipun secara umum praktik *shariah compliance* sudah berjalan, masih perlu adanya penguatan dalam aspek edukasi dan sosialisasi agar *shariah compliance* tidak hanya bersifat formalitas saja, tetapi juga dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh oleh semua pihak yang ada di BPRS Haji Miskin Pandai sikek.

7. Istiqamah

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek meskipun manejenjemen berusaha menjaga konsistensi, dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam mempertahankan operasional, terutama

saat menghadapi tekanan pasar likuiditas. Dalam konsistensi pelayanan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam pelayanan dan penerapan prinsip syariah sering kali terhambat oleh keterbatasan SDM yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip syariah. Hal ini menyabakan implementasi *istiqamah* belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan berkesinambungan sangat diperlukan agar *istiqamah* benar-benar terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber atas hasil riset yang sudah dicoba hal Analisa Aplikasi Islamic Corporate Govarnance atas BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, bisa disimpulkan kalau atas biasanya BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek sudah mempraktikkan prinsip- prinsip ICG begitu juga mestinya paling utama atas prinsip transparasi BPRS Haji Miskin Cerdas Sikek aktif mempublikasikan informasi finansial triwulanan serta keuntungan tahunan lewat bermacam alat (kediaman data, web website sah, web website OJK, alat cap). Kenaikan keuntungan bersih atas tahun 2024 membuktikan hasil positif atas kelangsungan ini. Penyeimbang antara kelangsungan serta proteksi pribadi pelanggan pula dilindungi.

Dalam aplikasi prinsip akuntabilitas, prinsip ini diaplikasikan lewat peliputan finansial teratur atas pemegang saham, DPS, serta OJK (tercantum RBB). Sistem pengaturan dalam yang kokoh, audit oleh akuntan khalayak serta OJK, dan kehadiran SOP, isyarat etik, serta ganjaran menguatkan adat akuntabilitas. Begitu pula keatas atas prinsip tanggung jawab BPRSHaji Miskin Pandai Sikek tidak cuma berpusat atas profitabilitas namun pula atas keselamatan sosial serta ekonomi warga lewat program CSR serta distribusi anggaran amal. Pengurusan resiko (angsuran, likuiditas, operasional, serta nama baik) lewat kebijaksanaan manajemen resiko menyeluruh pula jadi buatan atas tanggung jawab. Usaha kenaikan literasi finansial syariah atas pelanggan pula dicoba.

Terakhir atas prinsip kesetaraan, Prinsip ini diaplikasikan bagus atas pegawai ataupun pelanggan. Pegawai diserahkan remunerasi yang seimbang serta tembus pandang, dan peluang penataran pembibitan serta pengembangan. Ikatan arahan serta karyawan dibentuk atas bawah komunikasi terbuka. Buat pelanggan, kesetaraan terlihat dalam jasa yang menyeluruh, batas yang bersaing, serta sistem buat hasil yang seimbang. Cara rekrutmen pula dicoba atas cara adil serta tembus pandang.

Independensi dalam praktiknya, masih ada pengaruh kepentingan manajemen yang dapat melemahkan objektivitas pengawasan oleh DPS. Prinsip independensi masih perlu diperkuat melalui regulasi internal dan peningkatan integritas SDM. *Shariah Compliance* terdapat keterbatasan dalam sosialisasi akad kepada nasabah, karena sebagian besar karyawan memiliki latar belakang pendidikan umum. Hal ini menyebabkan masyarakat masih kurang memahami produk akad yang ditawarkan. *Istiqamah* konsistensi dalam pelayanan dan penerapan prinsip syariah sering terhambat oleh keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan.

Aplikasi Islamic Corporate Governance (ICG) atas BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah membuktikan hasil yang positif, walaupun sedang ada sebuatan pandangan yang butuh ditingkatkan. Hasil riset ini membuktikan kalau aplikasi ICG mempunyai efek yang penting keatas kenaikan kemampuan serta keyakinan pelanggan. Atas begitu, BPRS Haji Miskin Pandai Sikek butuh lalu tingkatkan aplikasi ICG buat tingkatkan kemampuan serta keyakinan pelanggan, dan menggapai tujuan syariah serta tingkatkan mutu layanan atas

cara berkepanjangan. Oleh sebab itu, riset ini mengusulkan supaya BPRS Haji Miskin Pandai Sikek lalu menjaga serta tingkatkan aplikasi ICG buat menggapai keberhasilan waktu panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2006).
- Badawi Hartati Wiwi, *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).
- Hikmah Endraswati Sopia Laila, “Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Atas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren,” *Journal On Islamic Finance* 8:2 (2022).
- Indra. Siswanti, “Implementasi Good Corporate Governance Atas Kinerja Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 7:2 (2016).
- Muh Awal Satrio Nugroho, “Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Kajian Bisnis* 23 No 1 (2015).
- Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013).